

# LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2020

Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Konser Bundengan

Alamat : Jln. Abdurrahman Wahid No. 104, Wonosobo

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD adalah salah satu entitas Pelaporan dibawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksananya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wonosobo, 25 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kab. Wonosobo  
Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian, dan Transmigrasi  
Kab. Wonosobo

**Kristiyanto, SH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

#### 1.1.1. Maksud

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

#### 1.1.2. Tujuan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajiakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntabilitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan

akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- i. Laporan Realisasi Anggaran
- ii. Neraca
- iii. Laporan Operasional
- iv. Laporan Perubahan Ekuitas

## **1.2. Landasan Hukum**

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

- Lain;Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keugian Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
  20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo ;
  21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
  22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ;
  26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ;
  27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ;

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 disusun agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

#### **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

##### **3.1. Laporan Realisasi Anggaran**

- 3.1.1. Pendapatan LRA
- 3.1.2. Belanja LRA

##### **3.2. Neraca**

- 3.2.1. Aset
- 3.2.2. Kewajiban
- 3.2.3. Ekuitas

##### **3.3. Laporan Operasional**

- 3.3.1. Pendapatan LO
- 3.3.2. Beban LO
- 3.3.3. Surplus / Defisit

##### **3.4. Laporan Perubahan ekuitas**

#### **Bab. IV Penutup**

**BAB II**  
**IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1 Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2020**

Selama periode berjalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/(KURANG)</b>	<b>%</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.710.855.200</b>	<b>(289.144.800)</b>	<b>90,36</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.710.855.200</b>	<b>(289.144.800)</b>	<b>90,36</b>
Pendapatan Retribusi Daerah	3.000.000.000	2.580.878.700	<b>(419.121.300)</b>	<b>86,03</b>
Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	-	129.976.500	129.976.500	-
<b>BELANJA</b>	<b>22.615.093.679</b>	<b>8.722.075.281</b>	<b>(13.893.018.398)</b>	<b>38,57</b>
Belanja Operasi	7.230.876.979	6.620.822.462	(610.054.517)	<b>91,56</b>
Belanja Modal	15.384.216.700	2.101.252.819	(13.282.963.881)	<b>13,66</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(19.615.093.679)</b>	<b>(6.011.220.081)</b>	<b>13.603.873.598</b>	<b>30,65</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(19.615.093.679)</b>	<b>(6.011.220.081)</b>	<b>13.603.873.598</b>	<b>30,65</b>

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.710.855,00 atau 90,36 % dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00. Realisasi tersebut kurang dari yang target anggaran yaitu sebesar Rp. 289.144.800,00.
2. Belanja Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi sebesar Rp. 8.722.075.281,00 atau 38,57 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 22.615.093.679,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 13.893.018.398,00.
3. Defisit anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp. 13.603.873.598,00).
4. SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mencapai (Rp. 6.011.220.081,00) turun sebesar Rp. 13.603.220.081,00 dari anggaran sebesar (Rp. 19.615.093.679,00).

## 2.2 Realisasi TA 2020 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2019

URAIAN	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik/(Turun)	%
<b>Pendapatan dan Belanja</b>				
Pendapatan	2.710.855.200,00	6.232.058.197,00	(3.521.202.997,00)	(56,50)
Belanja	8.722.075.281,00	26.344.048.071,00	(17.621.972.790,00)	(66,89)
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(6.011.220.081,00)</b>	<b>(20.111.989.874,00)</b>	<b>14.048.107.293,00</b>	<b>(69,85)</b>
<b>Pembiayaan</b>	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	-	-	-	-
<b>SILPA</b>	<b>(6.011.220.081,00)</b>	<b>(20.111.989.874,00)</b>	<b>14.048.107.293,00</b>	<b>(69,85)</b>

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- 2.2.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.710.855.200,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.232.058.197,00. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada penurunan realisasi pendapatan TA. 2020 sebesar Rp. 3.521.202.997,00 atau 56,50 % dibandingkan TA. 2019.
- 2.2.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari Rp. 26.344.048.071,00 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 8.722.075.081,00 atau mengalami penurunan 66,89 %.
- 2.2.3 SILPA Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 69,85 % dibandingkan SILPA Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 14.048.107.293,00.

## 2.3 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi

- 2.3.1 Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Secara umum kondisi Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya, ketertiban, keamanan, dan terutama dampak dari pandemik *covid-19* sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit pengelola pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah :

- 2.3.1.1 Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan retribusi;
- 2.3.1.2 Peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta mendukung Sapta Pesona didaerah masih rendah;



- 2.3.1.3 Belum ada pembaharuan beberapa peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, desa wisata, dan usaha pariwisata; dan
- 2.3.1.4 Kesadaran legalitas usaha pariwisata masih perlu ditingkatkan.

### 2.3.2 Hambatan dalam pencapaian target Belanja

Hambatan dalam pencapaian target Belanja antara lain :

- 2.3.2.1 Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang manajemen pariwisata, bahasa asing, perhotelan, teknik arsitektur, dan akuntansi, serta bidang lainnya;
- 2.3.2.2 Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang keluarannya diperubahan anggaran;
- 2.3.2.3 Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik; dan
- 2.3.2.4 Sistem Pengawasan dari BPK, BPKP, dll. dianggap sebagai penyebab terhambatnya proses tender pengadaan, misalnya pejabat ada yang enggan ditunjuk menjadi pemimpin proyek atau panitia pengadaan karena takut akan resiko dan ketidakpastian regulasi.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**3.1.1. Pendapatan LRA**

Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, berupa :

**3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah**

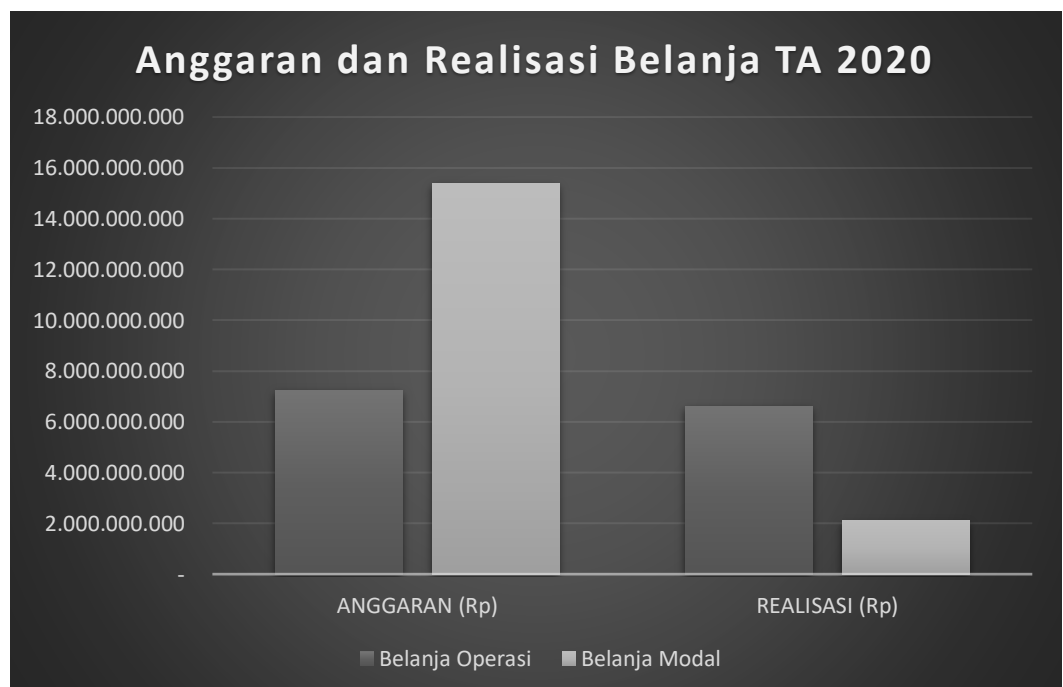
Realisasi retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.580.878.700,00. Adapun retribusi Daerah hanya berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

**3.1.1.2. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 129.976.500,00 berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang sah.

**3.1.2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA. 2020 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :



Secara garis besar, anggaran dan realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2020 serta realisasi TA. 2019 disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	( % )	REALISASI TA 2019 (Rp)
Belanja Operasi	7.230.876.979	6.620.822.462	91,56	13.682.685.338
Belanja Modal	15.384.216.700	2.101.252.819	13,66	12.661.362.733
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.615.093.679</b>	<b>8.722.075.281</b>	<b>38,57</b>	<b>26.344.048.071</b>

Realisasi Belanja TA. 2020 sebesar Rp. 8.722.075.281,00 dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 22.615.093.679,00. Bila dibandingkan dengan TA. 2019, realisasi belanja TA. 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 13.893.018.398,00 atau sebesar 38,57 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Realisasi belanja operasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 610.054.517,00 dibandingkan anggaran. Realisasi belanja tersebut lebih kecil dari realisasi Tahun 2019, dengan penurunan sebesar Rp. 7.061.862.926,00.
2. Realisasi belanja modal Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.282.963.881,00 dibandingkan anggaran 2020. Realisasi belanja modal tersebut lebih kecil dari realisasi Tahun 2019, dengan penurunan sebesar Rp. 10.560.109.914,00.

Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2020 :

#### 3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi TA. 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.620.822.462,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.230.876.979,00. Anggaran dan realisasi belanja operasi TA. 2020 serta TA. 2019 sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2020 (Rp)	( % )	REALISASI TA 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	4.134.117.484	3.654.356.311	88,40	4.272.234.810
Belanja Barang dan Jasa	3.096.759.495	2.966.466.151	95,79	7.074.152.500
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	293.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.230.876.979</b>	<b>6.620.822.462</b>	<b>91,56</b>	<b>13.682.685.338</b>

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.061.862.876,00 atau 51,61 %.

### 3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.101.252.819,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.384.216.700,00.

BELANJA MODAL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2020 (Rp)	REALISASI TA 2019 (Rp)	%
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	1.000.000.000	4.500.000	102.616.700	(100,00)
Belanja Bangunan dan Gedung	14.384.216.700	2.096.752.819	12.411.047.033	(83,11)
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	147.699.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>15.384.216.700</b>	<b>2.101.252.819</b>	<b>12.661.362.733</b>	<b>(83,40)</b>

Penjelasan :

#### 3.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 tidak ada karena tidak terdapat anggaran belanja modal untuk tanah.

#### 3.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.500.000,00 yang berasal dari hibah langsung Bank Jateng untuk TIC. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.616.700,00 maka realisasi anggaran Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 95,61 %.

#### 3.1.2.2.3. Belanja Bangunan dan Gedung

Realisasi belanja bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.096.752.819,00 atau mencapai 14,58 % dari anggaran sebesar Rp. 14.384.216.700,00. Adapun belanja bangunan dan Gedung tersebut terdiri dari belanja Gedung tempat olahraga sebesar Rp. 153.348.025,00, Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Kios Pasar Taman Rekreasi Rp. 27.142.800,00, dan bangunan Gedung tempat kerja Rp. 1.916.261.994,00. Realisasi Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp. 12.411.047.033,00. Belanja bangunan dan Gedung tersebut berupa pembangunan Rehabilitasi fasilitas dan amenitas Situs Tuk Bimolukar.

#### 3.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat anggaran. Hal tersebut karena adanya *refocusing* berkaitan pandemik **Covid-19**. Adapun realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 147.699.000,00 berupa pengaspalan kawasan pos penarikan tol Garung.

### 3.2. Neraca

Neraca Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 menunjukkan posisi Aset sebesar Rp. 52.891.941.261,50. Kewajiban sebesar Rp. 3.914.947,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 52.891.941.261,50 sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Aset	53.018.569.089,50	52.191.835.998,04	1,58
Kewajiban	3.914.947,00	11.207.448,00	(65,07)
Ekuitas	53.014.654.142,50	52.180.628.550,04	1,60
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>53.018.569.089,50</b>	<b>52.191.835.998,04</b>	1,58

#### 3.2.1. Aset

Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 53.018.569.089,50 dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut :

##### 3.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 165.598.956,14 terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Penerima	Rp.	38.362.400,00
2. Piutang Pendapatan	Rp.	247.660.000,00
3. Penyisihan Piutang	(Rp.	144.179.875,00)
4. Persediaan	Rp.	23.756.431,14
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>165.598.956,14</b>

Aset lancar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya terdiri dari kas di bendahara penerima, piutang pendapatan, dan persediaan, sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran, setara kas, investasi jangka pendek, piutang lainnya, penyisihan piutang, dan beban dibayar dimuka tidak ada aset lancar-nya. Berikut penjelasan dari 3 rincian tersebut diatas :

1. Kas di Bendahara Penerima

Saldo Kas di Bendahara Penerima per Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp. 38.362.400,00 dan Rp. 941.100,00. Kas tersebut meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerima yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah.

2. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 247.660.000,00 dan Rp. 95.816.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar 158,47 %. Piutang pendapatan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

3. Penyisihan Piutang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai penyisihan piutang pada Tahun 2020 sebesar (Rp. 144.179.875,00).

4. Persediaan

Nilai persediaan per Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 23.756.431,14 dan Rp. 26.028.766,04. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per Tanggal 31 Desember 2020 adalah alat/bahan untuk kegiatan kantor Rp. 23.756.431,14 yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 23.197.506,14, persediaan kertas dan cover sebesar Rp. 136.675,00, perangko, materai, benda pos dan cetak sebesar Rp. 81.000,00, dan persediaan bahan computer sebesar Rp. 341.250,00.

3.2.1.2. Aset Tetap

Asset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp. 52.144.354.327,36 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan saldo akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 52.107.735.706,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 36.618.621,36

dari Tahun 2019. Adapun rincian aset tetap selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Tanah	12.290.648.383,00	12.290.648.383,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.270.184.286,78	1.967.729.015,00	8,82
Gedung dan Bangunan	40.129.514.750,36	38.375.733.186,00	4,57
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	2.752.875.191,00	2.900.574.191,00	(5,09)
Aset Tetap Lainnya	468.908.698,00	596.236.988,00	(21,36)
Konstruksi dalam Pengerjaan	247.728.521,00	500.484.771,00	88,16
Akumulasi Penyusutan	(6.015.505.502,78)	(3.634.368.439,00)	65,46
<b>Jumlah</b>	<b>52.144.354.327,36</b>	<b>52.997.038.095,00</b>	<b>(0,54)</b>

Adapun penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

### 3.2.1.2.1. Tanah

No	Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019)	Koreksi (Rp)		Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 2020
		(Rp)	D	K	D	K	(Rp)
<b>I</b>	<b>Tanah Persil</b>	-	<b>1.404.331.000,00</b>	-	-	-	<b>1.404.331.000,00</b>
1	Tanah untuk Bangunan, Gd. Perdagangan/Perusahaan	-	1.014.500.000,00	-	-	-	1.014.500.000,00
2	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	389.831.000,00	-	-	-	389.831.000,00
<b>II</b>	<b>Tanah non Persil</b>	-	<b>6.473.082.865,00</b>	-	-	-	<b>6.473.082.865,00</b>
1	Tanah Kering	-	6.473.082.865,00	-	-	-	6.473.082.865,00
<b>III</b>	<b>Lapangan</b>	-	<b>4.413.234.518,00</b>	-	-	-	<b>4.413.234.518,00</b>
1	Tanah Lapangan Olah Raga	-	24.500.000,00	-	-	-	24.500.000,00
2	Tanah Lapangan Parkir	-	18.050.000,00	-	-	-	18.050.000,00
3	Tanah untuk Bangunan Air	-	121.500.000,00	-	-	-	121.500.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	-	740.875.470,00	-	-	-	740.875.470,00
5	Tanah untuk Taman	-	3.508.309.048,00	-	-	-	3.508.309.048,00
<b>IV</b>	<b>Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>	<b>11.385.722.913,00</b>	-	<b>11.385.722.913,00</b>	-	-	-
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.014.500.000,00	-	4.912.640.048,00	-	-	3.898.140.048,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.898.140.048,00	-	-	-	-	3.898.140.048,00
3	Tanah Kosong	6.473.082.865,00	-	6.473.082.865,00	-	-	-
<b>V</b>	<b>Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>	<b>904.925.470,00</b>	-	<b>904.925.470,00</b>	-	-	-
1	Tanah Lapangan Olah Raga	24.500.000,00	-	24.500.000,00	-	-	-
2	Tanah Lapangan Parkir	18.050.000,00	-	18.050.000,00	-	-	-
3	Tanah Untuk Bangunan Air	121.500.000,00	-	121.500.000,00	-	-	-

4	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	740.875.470,00	-	740.875.470,00			-
<b>Jumlah</b>		<b>12.290.648.383,00</b>	<b>12.290.648.383,00</b>	<b>12.290.648.383,00</b>	-	-	<b>12.290.648.383,00</b>

Terdapat koreksi debit maupun kredit pada aset tanah sebagaimana tabel diatas, namun tidak ada mutasi debit maupun kredit pada Tahun 2020. Pada Tahun Anggaran 2020 ada pengurangan aset koreksi kredit pada tanah untuk bangunan gedung sebesar Rp. 11.385.722.913,00 dan tanah untuk bangunan bukan Gedung sebesar Rp. 904.925.470,00.

### 3.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.865.112.315,00 dan Rp. 1.865.112.315,00. Aset tersebut tidak mengalami perubahan dari Tahun 2019.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2019	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2020
		D	K	D	K	
Alat-alat Bantu	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	544.611.204,00	-	-	-	-	544.611.204,00
Alat Ukur	12.283.700,00	-	-	-	-	12.283.700,00
Alat Pengolahan	-	12.999.525,00	-	-	-	12.999.525,00
Alat Kantor	440.297.240,00	92.307.348,00	-	-	-	532.604.588,00
Alat Rumah Tangga	417.902.992,00	59.282.855,00	-	-	-	477.185.847,00
Komputer	293.900.072,00	-	293.900.072,00	-	-	-
Meja dan Kursi Rapat/Kerja Pejabat	60.068.750,00	-	-	-	-	60.068.750,00
Alat Studio	136.037.828,00	109.884.457,00	136.037.828,00	-	-	109.884.457,00
Alat Komunikasi	6.334.000,00	-	-	-	-	6.334.000,00
Alat Kedokteran	-	25.160.404,00	-	-	-	25.160.404,00
Komputer Unit	-	235.372.683,00	-	13.392.500,00	-	248.765.183,00
Peralatan Komputer	-	58.527.389,00	-	-	-	58.527.389,00
Peralatan Olah Raga	-	176.759.240,00	0,22	-	-	176.759.239,78
Alat Keamanan dan Perlindungan	30.267.629,00	-	30.267.629,00	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.946.703.415,00</b>	<b>770.293.901,00</b>	<b>166.305.457,22</b>	<b>13.392.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.184.286,78</b>



Penjelasan Mutasi :

1. Alat-Alat Bantu

Nilai aset tetap berupa alat-alat bantu per Tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 sama dengan kondisi akhir Tahun 2019. Alat bantu tersebut berupa pompa.

2. Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 544.611.204,00 sama dengan kondisi akhir Tahun 2019. Aset tersebut berupa kendaraan dinas bermotor senilai Rp. 386.742.704,00 dan kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp. 157.868.500,00.

3. Alat Ukur

Nilai aset tetap berupa alat ukur per 31 Desember 2020 dan 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan yaitu sebesar Rp. 12.283.700,00. Adapun alat ukur dimaksud berupa Jangka Sorong (Rp. 1.600.000,00), *GPS* (Rp. 3.099.800,00), *Digital Meter* (Rp. 3.000.800,00), dan Alat Timbang Digital (Rp. 4.582.600,00).

4. Alat Pengolahan

Nilai aset tetap berupa alat pengolahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 12.999.525,00. Tahun 2019 tidak ada dan mengalami koreksi debit.

5. Alat Kantor

Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 483.438.385,00. Mengalami penambahan sebesar 49.166.203,00 karena adanya koreksi beban persediaan, beban jasa, dan beban perjalanan dari BTT sehingga nilai Tahun 2020 menjadi Rp. 532.604.588,00.

6. Alat-Alat Rumah Tangga

Nilai aset tetap berupa alat-alat rumah tangga per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 477.185.847,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp. 417.902.992,00. Adanya penambahan aset tersebut karena terjadi mutasi debit berupa pengadaan Meubelair (berasal dari dana hibah

Bank Jateng berupa uang tunai pembuatan TIC sebesar Rp. 4.500.000,00.

7. Meja dan Kursi Rapat Pejabat

Nilai aset tetap berupa meja dan kursi/rapat pejabat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 60.068.750,00 dan sama dengan Tahun 2019. Tidak mengalami koreksi debet-kredit maupun mutasi debet-kredit.

8. Alat Studio

Nilai aset tetap berupa alat studio per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 109.884.457,00. Tidak mengalami/terjadi mutasi maupun koreksi.

9. Alat Komunikasi

Nilai aset berupa alat komunikasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.334.000,00 sama dengan Tahun 2019.

10. Alat Kedokteran

Nilai aset tetap berupa alat kedokteran pada Tahun 2019 tidak ada, namun pada Tahun 2020 terdapat aset tersebut sebesar Rp. 25.160.404,00. Adapun penambahan tersebut berasal dari beban persediaan belanja termogun, masker, hand sanitizer, desinfektan yang berasal dari BTT.

11. Komputer Unit

Nilai aset tetap berupa komputer unit per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 248.765.183,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp. 235.372.683,00. Adanya penambahan aset tersebut karena terjadi mutasi debet sebesar Rp. 13.392.500,00.

12. Peralatan Komputer

Nilai aset berupa peralatan komputer per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 58.527.389,00 sama dengan Tahun 2019.

13. Peralatan Olah Raga

Nilai aset tetap berupa peralatan olah raga per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 176.759.239,78 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp. 176.759.240,00. Terjadi pengurangan nilai aset tetap karena adanya koreksi kredit sebesar Rp. 0,22.

### 3.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 40.129.514.750,36 dan Rp. 38.474.001.236,00 mengalami koreksi debit sebesar Rp. 376.099.157,43, dan kredit Rp. 817.338.462,07, serta mutase debit sebesar Rp. 2.096.752.819,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019
		D	K	D	K	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.209.619.390,00	376.099.157,43	817.338.462,07	2.096.752.819,00	-	39.865.132.904,36
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.731.470,00	-	-	-	-	149.731.470,00
Tugu Peringatan	114.650.376,00	-	-	-	-	114.650.376,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.474.001.236,00</b>	<b>376.099.157,43</b>	<b>817.338.462,07</b>	<b>2.096.752.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.129.514.750,36</b>

Penjelasan Mutasi :

#### 1. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Nilai aset tetap berupa bangunan gedung tempat kerja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 39.865.132.904,36 dan Rp. 38.20.619.390,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.655.513.514,36 atau sebesar 4,33 % dari Tahun 2019. Mutasi debit sebesar Rp. 2.096.752.819,00 adalah hasil pengadaan barang Tahun 2020 dari belanja modal dan bangunan berupa penataan Kawasan Bimolukar dan revitalisasi kolam renang Taman Rekreasi Kalianget. Realisasi Anggaran Tahun 2020 terjadi koreksi debit sebesar Rp. 376.099.157,43 dan kredit Rp. 817.338.462,07 serta mutasi debit sebesar Rp. 2.096.752.819,00.

#### 2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Nilai aset tetap berupa bangunan Gedung tempat tinggal per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 149.731.470,00, tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

#### 3. Tugu Peringatan

Nilai aset tetap berupa Tugu Peringatan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 114.650.376,00 dan

Rp. 114.650.376,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

#### 3.2.1.2.4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Nilai jalan, jaringan, dan instalasi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 2.752.875.191,00 dan Rp. 2.752.875.191,00, mengalami penambahan dari Tahun 2019. Mutasi transaksi terhadap jalan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019) (Rp)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2020 (Rp)
		D	K	D	K	
Jalan	1.536.268.060,00	-	-	-	-	1.536.268.060,00
Bangunan Air Irigasi	122.332.953,00	-	-	-	-	122.332.953,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	93.750.000,00	-	-	-	-	93.750.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	467.853.678,00	-	-	-	-	467.853.678,00
Instalasi Air Minum/Air Bersih	487.990.500,00	-	-	-	-	487.990.500,00
Jaringan Listrik	44.680.000,00	-	-	-	-	44.680.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.752.875.191,00</b>	-	-	-	-	<b>2.752.875.191,00</b>

Penjelasan mutasi :

##### 1. Jalan

Nilai aset tetap berupa jalan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.536.268.060,00 dan Rp. 1.536.268.060,00. Tidak mengalami koreksi kredit-debet dan mutasi debet-kredit.

##### 2. Bangunan Air irigasi

Nilai aset tetap berupa bangunan air irigasi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 122.332.953,00 dan Rp. 122.332.953,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

##### 3. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Nilai aset tetap berupa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 93.750.000,00 dan Rp. 93.750.000,00 tidak

mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

4. Bangunan Air Bersih/Baku

Nilai aset tetap berupa bangunan air bersih/baku per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 467.853.678,00 dan Rp. 467.853.678,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

5. Instalasi Air Munum/Air Bersih

Nilai aset tetap berupa instalasi air minum/air bersih per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 487.990.500,00 dan Rp. 487.990.500,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

6. Jaringan Listrik

Nilai aset tetap berupa jaringan listrik per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 44.680.000,00 dan Rp. 44.680.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

3.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama sebesar Rp. 468.908.698,00 tidak mengalami penambahan/pengurangan dari Tahun 2019. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2020
		D	K	D	K	
Bahan Perpustakaan Tercetak	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	192.836.000,00	-	-	-	-	192.836.000,00
Kartografi, Naskah, dan Lukisan	24.400.000,00	-	-	-	-	24.400.000,00
Karya Grafika	10.900.000,00	-	-	-	-	10.900.000,00
Barang Bercorak Kesenian	62.406.748,00	-	-	-	-	62.406.748,00
Alat Bercorak Kebudayaan	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Aset Tetap Renovasi	148.365.950,00	-	-	-	-	148.365.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>468.908.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.908.698,00</b>

Penjelasan mutasi :

1. Bahan Perpustakaan Tercetak

Nilai aset tetap berupa buku per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

2. Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

Nilai aset tetap berupa barang-barang perpustakaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 192.836.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

3. Kartografi, Naskah, dan Lukisan

Nilai aset tetap berupa barang bercorak kebudayaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 24.400.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

4. Karya Grafika

Nilai aset tetap berupa karya grafika per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama sebesar Rp 10.900.000,00. Tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

5. Barang Bercorak Kesenian

Nilai aset tetap berupa barang bercorak kesenian per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 62.406.748,00. Tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

6. Alat Bercorak Kebudayaan

Nilai aset tetap berupa alat bercorak kebudayaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00. Tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2019.

7. Aset Tetap Renovasi

Nilai aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 148.365.950,00. Tidak mengalami penambahan atau pengurangan.

### 3.2.1.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 941.724.076,00 dan Rp. 500.484.771,00 mengalami koreksi debit sebesar Rp. 475.459.842,00 dan kredit Rp. 34.220.537,00 sedangkan mutasi debit dan kredit tidak ada. Adapun transaksi terhadap konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2019
		D	K	D	K	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	306.509.265,00	475.459.842,00	34.220.537,00	-	-	747.748.570,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	193.975.506,00	-	-	-	-	193.975.506,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.484.771,00</b>	<b>475.459.842,00</b>	<b>34.220.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.724.076,00</b>

Penjelasan mutasi :

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja  
Pada saldo tersebut Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp. 747.748.570,00 dan Rp. 306.509.265,00. Mengalami koreksi debit sebesar Rp. 475.459.842,00 dan kredit Rp. 34.220.537,00.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan  
Konstruksi dalam pengerjaan jalan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 193.975.506,00, tidak mengalami koreksi maupun mutasi.

### 3.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp. 6.013.304.198,78) dan (Rp. 4.851.265.271,78). Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mutasi transaksi terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2020
		D	K	D	K	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.593.688.323,78)	-	(181.993.794,00)	(13.392.500,00)	-	(1.789.074.617,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.198.218.464,00)	-	(763.537.881,00)	-	-	(2.961.756.345,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(989.692.059,00)	-	(188.278.157,00)	-	-	(1.177.970.216,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(69.666.425,00)	-	(14.836.595,00)	-	-	(84.503.020,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(4.851.265.271,78)</b>	<b>-</b>	<b>(1.148.646.427,00)</b>	<b>(13.392.500,00)</b>	<b>-</b>	<b>(6.013.304.198,78)</b>

Penjelasan mutasi :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penyusutan alat angkutan darat bermotor alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, dan alat komunikasi. Adapun Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 1.789.074.617,78) terdapat koreksi kredit sebesar (Rp. 181.993.794,00) dan mutasi debet (Rp. 13.392.500,00), sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp. 1.593.688.323,78).

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar (Rp. 2.961.756.345,00) dan (Rp. 2.198.218.464,00). Terdapat koreksi kredit (Rp. 763.537.881,00), dan tidak terjadi mutasi debet maupun kredit.

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu peringatan.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebesar (Rp. 1.177.970.216,00) dan (Rp. 989.692.059,00). Terdapat koreksi kredit sebesar (Rp. 188.278.157,00) dan mutasi debet (Rp. 188.278.157,00).

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan, bangunan air irigasi, bangunan pengembangan



sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, dan instalasi air minum/air bersih.

#### 4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebesar (Rp. 84.503.020,00) dan (Rp. 69.666.425,00). Terdapat koreksi kredit sebesar (Rp. 14.836.595,00).

#### 3.2.1.3. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 14.620.251,00 dan Rp. 15.562.946,00 mengalami pengurangan dari Tahun 2019. Adapun pengurangan tersebut berasal dari koreksi kredit sebesar Rp. 442.085,00 dan mutasi kredit Rp. 500.610,00. Mutasi transaksi terhadap aset lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020 (31/12/2019)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2020
		D	K	D	K	
Aset Tak Berwujud	1.768.340,00	-	442.085,00		-	1.326.255,00
Aset Lain-lain	13.794.606,00	-	-	-	500.610,00	13.293.996,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.562.946,00</b>	<b>-</b>	<b>442.085,00</b>	<b>-</b>	<b>500.610,00</b>	<b>14.620.251,00</b>

##### 3.2.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.326.255,00 dan Rp. 1.768.340,00. Mengalami pengurangan dikoreksi kredit Rp. 442.085,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun aset tak berwujud tersebut adalah *software* dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya.

##### 3.2.1.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 13.293.996,00 dan Rp. 12.461.836,00. Mengalami pengurangan sebesar Rp. 500.610,00 berasal dari mutasi kredit. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

### 3.2.2. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 3.914.947,00 dan Rp. 11.207.448,00 mengalami penurunan dari Tahun 2019. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memiliki kewajiban jangka pendek berupa utang beban sebesar Rp. 3.914.947,00 sedangkan kewajiban jangka Panjang tidak ada.

### 3.2.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 52.88.026.314,50 dan Rp. 51.833.341.276,26 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 3.3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/deficit operasional.

### 3.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Pariwisata dan Kabudayaan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayar kembali Periode Tahun Anggaran 2020, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut :

URAIAN	2020	2019	+ / -	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	2.580.878.700,00	6.307.017.800,00	(3.726.139.100,00)	(59,08)
Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	277.840.757,00	10.496.897,00	267.343.860,00	2.546,88
<b>Jumlah</b>	<b>2.858.719.457,00</b>	<b>6.317.514.697,00</b>	<b>(3.458.795.240,00)</b>	<b>(54,75)</b>

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 2.858.719.457,00 dan Rp. 6.317.514.697,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.458.795.240,00 atau sebesar (59,08 %).

Realisasi masing-masing pendapatan-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya bersumber dari pendapatan retribusi

Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan retribusi Daerah berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp. 2.580.878.700,00 dan Rp. 6.307.017.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.726.139.100,00 atau 59,08 % dari Tahun 2019.

### 3.3.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya, maupun bantuan keuangan baik Tahun 2020 dan 2019.

### 3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan lain-lain Daerah yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 277.840.757,00 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 10.496.897,00. Pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah sistem sewa. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada pendapatan daerah yang sah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya baik Tahun 2020 dan 2019.

### 3.3.2. Beban

Beban sesuai PSAP 12 adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.878.948.269,90 dan Rp. 14.763.327.247,96 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.953.958.853,06 atau sebesar 47,10 % dari Tahun 2019.

URAIAN	2020	2019	+ / -	%
Beban Pegawai-LO	3.654.356.311,00	4.272.234.810,00	(617.878.499,00)	(14,46)
Beban Persediaan	814.501.844,90	1.812.319.226,96	(997.817.382,10)	(55,06)
Beban Jasa	1.532.023.806,00	4.890.520.266,00	(3.358.496.460,00)	(68,67)
Beban Pemeliharaan	114.160.480,00	67.434.994,00	46.725.486,00	69,29
Beban Perjalanan Dinas	285.999.604,00	712.762.918,00	(426.763.314,00)	(59,87)
Beban Hibah	184.310.000,00	2.043.298.028,00	(1.858.988.028,00)	(90,98)
Beban Bantuan Sosial	-	74.600.000,00	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.149.416.349,00	890.157.005,00	259.259.344,00	29,13
Beban Lain-lain	144.179.875,00	52.916.250,00	91.263.625,00	172,47
<b>Jumlah</b>	<b>7.878.948.269,90</b>	<b>14.763.327.247,96</b>	<b>(6.953.958.853,06)</b>	<b>(47,10)</b>

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 dan 2019 tidak memiliki Beban berupa beban bunga, beban subsidi, beban penyisihan piutang, beban bantuan sosial, beban lain-lain, dan beban transfer bagi hasil pajak Daerah.

### 3.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar RP. 3.654.356.311,00 dan Rp. 3.654.356.311,00 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari Tahun 2019.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pegawai	Jumlah (Rp)
<b>Beban Gaji dan Tunjangan – LO</b>		<b>2.233.178.336,00</b>
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.760.869.700,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	175.563.060,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	133.700.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional – LO	-
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	59.515.000,00
6	Beban Tunjangan Beras – LO	97.984.260,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.521.417,00
8	Beban Pembulatan Gaji – LO	24.899,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	-
10	Beban Uang Paket – LO	-
11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah – LO	-
12	Beban Tunjangan Komisi – LO	-
13	Beban Tunjangan Badan Anggaran – LO	-
14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan – LO	-
15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	-
16	Beban Tunjangan Perumahan – LO	-
17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas – LO	-
18	Beban Uang Jasa Pengabdian – LO	-
19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	-
20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD – LO	-
21	Tunjangan Profesi Guru-LO	-
22	Beban Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian - LO	-
23	Tunjangan Khusus Guru-LO	-
24	Beban Tunjangan Transportasi – LO	-
25	Tunjangan Khusus PNS-LO	-
<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO</b>		<b>1.179.054.975,00</b>

1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	-
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	-
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	-
4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	-
5	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	-
6	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.179.054.975,00
<b>Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO</b>		-
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	-
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	-
3	Beban Tunjangan Reses – LO	-
<b>Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO</b>		-
1	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO	-
2	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	-
3	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO	-
4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan – LO	-
5	Beban Pemungutan PBB – LO	-
<b>Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LO</b>		-
1	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor – LO	-
2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	-
3	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	-
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	-
5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	-
6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	-
7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	-
8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	-
9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	-
10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	-
11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	-
12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	-
13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet – LO	-
14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	-
15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	-
16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	-
17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	-
<b>Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO</b>		<b>48.000.000,00</b>
1	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	-
2	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	-
3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	-
4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	-
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	-

6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO	-
7	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	-
8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	-
9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	-
10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	-
11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	-
12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO	-
13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	-
14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO	-
15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	-
16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	-
17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	-
18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas – LO	-
19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	-
20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO	48.000.000,00
<b>Beban Uang Lembur – LO</b>		<b>16.798.000,00</b>
1	Beban Uang Lembur PNS – LO	16.798.000,00
2	Beban Uang Lembur Non PNS – LO	-
<b>Beban Honorarium Non Pegawai - LO</b>		-
1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO	-
2	Beban Moderator - LO	-
3	Dst.....	-
<b>Beban Honorarium PNS - LO</b>		<b>177.325.000,00</b>
1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	20.450.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.225.000,00
3	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	-
4	Beban Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan - LO	87.000.000,00
5	Beban Honorarium Pengelola Inventaris Barang - LO	-
6	Beban Honorarium Koordinator/Operator - LO	-
7	Beban Honorarium Tim Angka Kredit - LO	-
8	Beban Honorarium PLT - LO	-
9	Beban Honorarium Petugas Piket - LO	-
10	Beban Honorarium Sidang Tim - LO	67.750.000,00
11	Beban Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - LO	900.000,00
12	Beban Honorarium Kepanitiaan - LO	-
13	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	-
<b>Beban Honorarium Non PNS - LO</b>		-
1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	-
2	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	-
3	Beban Honorarium Petugas Pelaksana - LO	-
4	Beban Honorarium Pengurus Organisasi/Kelembagaan - LO	-
5	Beban Honorarium Petugas Piket - LO	-
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>		<b>3.654.356.311,00</b>

### 3.3.2.2. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 814.501.844,90 dan Rp. 1.812.319.226,96. Mengalami penurunan sebesar Rp. 997.817.382,00 atau 55,06 % dari Tahun 2019.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Persediaan	Jumlah (Rp)
<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>		<b>151.319.265,00</b>
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	31.452.930,00
2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-
3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.782.450,00
4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.241.000,00
5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.717.885,00
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.835.000,00
7	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-
8	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	-
9	Beban Bahan dan Alat Olah Raga – LO	-
10	Beban Bahan dan Alat Keperluan Kantor-LO	-
11	Beban Dekorasi, Dokumentasi, dan Publikasi (Iklan, Spanduk, dan Lain-lain)-LO	80.290.000,00
<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>		<b>209.351.109,90</b>
1	Beban Cetak	142.501.409,90
2	Beban Penggandaan	66.849.700,00
3	Beban Penjilidan – LO	-
4	Beban Laminating – LO	-
<b>Beban Persediaan Bahan/ Material</b>		<b>286.215.470,00</b>
1	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	162.143.470,00
2	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-
3	Beban Persediaan Bibit Ternak	-
4	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	-
5	Beban Persediaan Bahan Kimia	-
6	Beban Persediaan Makanan Pokok	-
7	Beban Bahan Makanan Rumah Sakit (Pasien, Dokter Jaga dan Paramedis) – LO	-
8	Beban Bahan Makanan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah – LO	-
9	Beban Perlengkapan Rumah Dinas – LO	-
10	Beban Bahan Praktek – LO	4.950.000,00
11	Beban Bahan Pengumuman dan Sejenisnya - LO	-
12	Beban Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel - LO	-
13	Beban Bahan Sarana Belajar Mengajar – LO	-
14	Beban Bahan Jaringan dan Instalasi – LO	-
15	Beban Bahan Radiologi – LO	-

16	Beban Bahan dan Alat Rumah Tangga – LO	-
17	Beban Bahan dan Alat Pertanian – LO	-
18	Beban Pakan Ternak – LO	-
19	Beban Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) – LO	-
20	Beban Bahan dan Alat Kesehatan – LO	-
21	Beban Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan-LO	119.122.000,00
<b>Beban Makanan dan Minuman</b>		<b>167.616.000,00</b>
1	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-
2	Beban Makanan dan Minuman Rapat	79.241.500,00
3	Beban Makanan dan Minuman Tamu	2.295.000,00
4	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	-
5	Beban Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	84.879.500,00
6	Beban makanan dan Minuman Lembur – LO	1.200.000,00
7	Beban Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Pasien - LO	-
8	Beban Extra Fooding	-
<b>Beban Pakaian Dinas dan Atributnya</b>		-
1	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	-
2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	-
3	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)	-
4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-
5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-
6	Dst ...	-
7	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) – LO	-
8	Beban Kelengkapan pakaian Dinas – LO	-
9	Beban Pakaian Dinas Lapangan – LO	-
<b>Beban Pakaian Kerja</b>		-
1	Beban Pakaian kerja lapangan	-
2	Beban Pakaian Kerja Identitas	-
<b>Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		-
1	Beban Pakaian KORPRI	-
2	Beban Pakaian Adat Daerah	-
3	Beban Pakaian Batik Tradisional	-
4	Beban Pakaian Olahraga	-
5	Beban Pakaian Paskibraka – LO	-
6	Beban Pakaian Seragam Organisasi – LO	-
7	Beban Kelengkapan Pakaian (Rompi dll) - LO	-
8	Beban Pakaian Seragam Tim – LO	-
<b>Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>		-
1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-
2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-
3	Beban Barang/Jasa Yg Akan Diserahkan Kpd Masy/Pihak Ketiga – LO	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>		<b>814.501.844,90</b>



### 3.3.2.3. Beban Jasa

Jumlah beban jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.532.023.806,00 dan Rp. 4.940.520.266,00. Mengalami penurunan sebesar Rp. 3.408.496.460,00 atau 68,99 % dari Tahun 2019. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Jasa	Jumlah (Rp)
<b>Beban Jasa Kantor</b>		<b>1.283.622.306,00</b>
1	Beban Jasa telepon	9.008.264,00
2	Beban Jasa air	5.020.615,00
3	Beban Jasa listrik	68.787.247,00
4	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	-
5	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00
6	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	9.168.680,00
7	Beban Jasa Paket/Pengiriman	-
8	Beban Jasa Sertifikasi	22.000.000,00
9	Beban Jasa Transaksi Keuangan	-
10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	-
11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-
12	Beban Air Time Radio Swasta – LO	-
13	Beban Jasa Perawatan dan Pengobatan – LO	-
14	Beban jasa General Chek Up – LO	-
15	Beban Uang saku kegiatan/rapat – LO	223.200.000,00
16	Beban Retribusi Kebersihan kota – LO	-
17	Beban Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban - LO	128.100.000,00
18	Beban Pajak Bumi dan Bangunan – LO	-
19	Beban Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana - LO	606.212.500,00
20	Beban Jasa service dan Penggantian komponen – LO	10.050.000,00
21	Beban Jasa Pengangkutan Barang – LO	-
22	Beban Propaganda, Penerangan dan publikasi – LO	-
23	Beban Pengurusan Perpanjangan Perizinan – LO	-
24	Beban Perawatan alat Kesehatan dan Laboratorium – LO	-
25	Beban Jasa Pelayanan umum – LO	-
26	Beban Jasa Pelayanan Medis – LO	-
27	Beban Jasa Biro Perjalanan – LO	-
28	Beban Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi - LO	-
29	Beban luran kepesertaan - LO	-
30	Beban Penetapan NIP CPNS - LO	-

31	Beban stimulan pembangunan - LO	-
32	Beban Jasa Pihak Ketiga - LO	25.350.000,00
33	Beban Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan - LO	-
34	Beban Jasa administrasi Perijinan Penyiaran - LO	-
35	Beban Jasa administrasi Perijinan - LO	-
36	Beban Jasa Pinjaman UMKM - LO	-
37	Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan - LO	-
38	Beban Jasa Pesalinan - LO	-
39	Beban Jasa Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga Pendidik/Kependidikan - LO	-
40	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat - LO	-
41	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan - LO	-
42	Beban Jasa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan - LO	-
43	Beban jasa hiburan/kesenian - LO	14.295.000,00
44	Beban jasa pengelolaan LPPL - LO	-
45	Beban Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan - LO	-
46	Beban Pajak ABT-LO	-
47	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Daerah	-
48	Beban Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	158.950.000,00
49	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-
<b>Beban Premi Asuransi</b>		-
1	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	-
2	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	-
3	Beban Premi Asuransi Kesehatan Non PNS - LO	-
<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>9.000.000,00</b>
1	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-
2	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	9.000.000,00
3	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-
4	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	-
5	Belanja Sewa Penginapan & Akomodasi - LO	-
6	Beban Sewa Tanah - LO	-
7	Beban Sewa panggung/Stan - LO	-
<b>Beban Sewa Sarana Mobilitas</b>		<b>83.287.500,00</b>
1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	83.287.500,00
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	-
3	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	-
<b>Beban Sewa Alat Berat</b>		-
1	Beban Sewa Eskavator	-
2	Beban Sewa Buldoser	-
3	Beban Sewa Alat-alat Berat	-
<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>114.600.000,00</b>
1	Beban Sewa Meja Kursi	-
2	Beban Sewa Komputer dan Printer	-
3	Beban Sewa Proyektor	-
4	Beban Sewa Generator	-
5	Beban Sewa Tenda	-
6	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00
7	Beban Sewa Alat Elektronik - LO	13.500.000,00

8	Beban Sewa Alat Rumah tangga - LO	-
9	Beban Sewa Alat-alat Tradisional - LO	-
10	Beban Sewa Peralatan/Perlengkapan SAR - LO	-
11	Beban Sewa alat-alat Sarana perlengkapan olahraga - LO	96.600.000,00
12	Beban Sewa Peralatan Praktek - LO	-
13	Beban Sewa Peralatan/Perlengkapan SAR	-
<b>Beban Jasa Konsultasi</b>		<b>41.514.000,00</b>
1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	-
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	41.514.000,00
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	-
4	Beban Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademis	-
<b>Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>		-
1	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	-
2	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	-
<b>Beban Beasiswa Pendidikan PNS</b>		-
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3	-
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	-
3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	-
4	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	-
<b>Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>		-
1	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	-
2	Beban Sosialisasi	-
3	Beban Bimbingan Teknis	-
4	Beban Seminar, Lokakarya-LO	-
<b>Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>		-
1	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	-
2	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	-
<b>Jumlah Beban Jasa</b>		<b>1.532.023.806,00</b>

#### 3.3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 67.434.994,00 dan Rp. 69.748.192,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.313.198,00 atau sebesar 3,32 % dari Tahun 2019.

Beban Pemeliharaan adalah merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Jumlah (Rp)
<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>		<b>67.160.480,00</b>
1	Beban Jasa Service	10.000.000,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.705.280,00
4	Beban Jasa KIR	-
5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-
6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-
7	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.455.200,00

8	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	-
9	Beban Administrasi Kendaraan - LO	-
<b>Beban Pemeliharaan</b>		<b>47.000.000,00</b>
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.000.000,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>		<b>114.160.480,00</b>

### 3.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 285.999.604,00 dan Rp. 712.762.918,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 426.763.314,00 atau sebesar 59,87 % dari Tahun 2019.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Perjalanan Dinas	Jumlah (Rp)
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>285.999.604,00</b>
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.340.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.659.604,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
<b>Beban Perjalanan Pindah Tugas</b>		<b>-</b>
1	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	-
2	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	-
<b>Beban Pemulangan Pegawai</b>		<b>-</b>
1	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	-
2	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	-
3	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	-
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>285.999.604,00</b>

### 3.3.2.6. Beban Hibah

Beban hibah pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 184.310.000,00 dan Rp. 2.043.298.028,00. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Hibah	Jumlah (Rp)
<b>Beban Hibah kepada Pemerintah</b>		<b>-</b>
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	-
<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>-</b>
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	-
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	-

3	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	-
<b>Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD</b>		-
1	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	-
<b>Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat</b>		-
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-
<b>Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>		-
1	Beban Hibah kepada Organisasi /Keagamaan - LO	-
2	KONI - LO	-
3	Kwarcab Pramuka - LO	-
4	PMI - LO	-
5	Korpri - LO	-
6	Dewan Koperasi Indonesia - LO	-
7	Komisi Penanggulangan Aids Indonesia - LO	-
8	KNPI - LO	-
9	Dharma Wanita - LO	-
10	LVRI - LO	-
11	Komisi Pemilihan Umum - LO	-
12	BAWASLU - LO	-
13	POLRES - LO	-
14	KODIM - LO	-
15	PBSI - LO	-
<b>Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar</b>		-
1	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....	-
2	Beban Hibah Dana BOP PAUD - LO	-
3	Beban Hibah Dana BOS kepada SD Swasta - LO	-
4	Beban Hibah Dana BOS kepada SMP Swasta - LO	-
5	Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	-
<b>Beban Hibah Kepada Pemerintah Desa</b>		-
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Desa	-
<b>Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>		<b>184.310.000,00</b>
1	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-
2	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-
3	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	184.310.000,00
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>184.310.000,00</b>

### 3.3.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.149.416.349,00 dan Rp. 921.721.290,57. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 227.695.058,43 atau sebesar 24,70 % dari Tahun 2019.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban

Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah (Rp)
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>		<b>181.993.794,00</b>
1	Beban Penyusutan Alat Bantu	714.286,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.523.197,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-
4	Beban Penyusutan Alat Kantor	39.335.149,00
5	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	38.675.789,00
6	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.626.749,00
7	Beban Penyusutan Alat Studio	16.701.292,00
8	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	815.917,00
9	Beban Penyusutan Komputer Unit	20.784.352,00
10	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	18.468.730,00
11	Beban Penyusutan Peralatan Olah Raga	22.348.333,00
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>		<b>763.865.717,00</b>
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	758.578.079,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.994.630,00
3	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.293.008,00
<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b>		<b>188.278.158,00</b>
1	Beban Penyusutan Jalan	153.626.806,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.446.660,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.125.000,00
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	11.696.342,00
5	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	16.266.350,00
6	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.117.000,00
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>		<b>14.836.595,00</b>
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	14.836.595,00
<b>Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>		<b>-</b>
1	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	-
<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>		<b>442.085,00</b>
1	Beban Amortisasi Goodwill	-
2	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	-
3	Beban Amortisasi Hak Cipta	-
4	Beban Amortisasi Paten	-
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	442.085,00
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortasi</b>		<b>1.149.416.349,00</b>

### 3.3.2.8. Beban Lain-lain

Beban lain-lain pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp. 144.179.875,00 dan Rp. 52.916.250,00. Beban lain-lain tersebut berupa beban penyisihan piutang retribusi. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Lain-lain	Jumlah (Rp)
<b>Beban Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		<b>144.179.875,00</b>
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	-
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	4.200.000,00
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	<b>139.979.875,00</b>
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-
7	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	-
8	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	-
9	Beban Penyisihan Piutang Hibah	-
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-
<b>Beban Penyisihan Piutang Lainnya</b>		<b>-</b>
1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-
2	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-
3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-
5	Beban Penyisihan Uang Muka	-
<b>Jumlah Beban Lain-lain</b>		<b>144.179.875,00</b>

### 3.3.3. Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp. 3.478.633,00 sedangkan pada Tahun 2019 tidak terdapat surplus/defisit non operasional.

### 3.3.4. Pos Luar Biasa

Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak terdapat pendapatan luar biasa maupun beban luar biasa.

### 3.3.5. Surplus/Defisit LO

Realisasi surplus/defisit-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 5.091.350.179,90). Apabila dibandingkan dengan realisasi surplus/defisit-LO Tahun 2019 sebesar (Rp. 8.455.693.086,53), maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.364.342.906,63 atau 39,79 %.

### **3.4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama Tahun Anggaran 2020. Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 52.888.026.314,50 berasal dari saldo awal ekuitas per Desember 2019 sebesar Rp. 52.180.628.550,04 ditambah defisit-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 5.091.350.179,90) ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 249.893.436,64) dan kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 6.048.641.381,00.

#### **3.4.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 52.180.628.550,04 berasal dari saldo ekuitas neraca per 31 Desember 2019 setelah audit.

#### **3.4.2. Surplus Defisit LO Tahun Anggaran 2020**

Surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 5.091.350.179,90) berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional.

#### **3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan atas ekuitas awal sebesar (Rp. 249.893.436,64) yang terdiri dari koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 44.149.750,00 selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0,00 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp. 294.043.186,64).

#### **3.4.4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

Dalam hal pencatatan kewajiban selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan (perkembangan) yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Kewajiban untuk dikonsolidasikan dari laporan perubahan ekuitas adalah sebesar Rp. 6.048.641.381,00.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam Tahun Anggaran 2020 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020.

Wonosobo, 25 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kab. Wonosobo  
Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian, dan Transmigrasi  
Kab. Wonosobo

**Kristiyanto, SH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 006

# LAMPIRAN